

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu momen yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan untuk syarat sah perkawinan terdapat dalam Pasal 2 dimana pada ayat (2) menyatakan perkawinan sah apabila dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam penerapannya terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini lah yang menyebabkan kesulitan dalam hal terjadi perceraian antara pasangan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN. Stb merupakan salah satu putusan perceraian dimana hakim memutus cerai pada perkawinan yang tidak dicatatkan.

Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dalam Putusan Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN. Stb yang perkawinannya tidak di catatkan di Kantor Catatan Sipil serta mengetahui akibat hukum dari dikabulkannya gugatan perceraian pada perkawinan yang tidak dicatatkan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta hasil dari wawancara hakim.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif guna menjelaskan bagaimanakah perceraian yang dilakukan melalui pengadilan pada perkawinan yang tidak dicatatkan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini bahwa perceraian pada perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dikabulkan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN. Stb, dimana dalam putusan tersebut hakim menggunakan asas *Ius Curia Novit* dalam mengadili perkara, serta mengikuti pandangan Legisme yang menafsirkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan lebih menekankan pada alasan-alasan perceraian. Selain itu, akibat dari dikabulkannya gugatan perceraian pada perkawinan yang tidak dicatatkan adalah para pihak yang bercerai tidak dapat mendaftarkan perceraian dan tidak dapat memperoleh akta perceraian akibat tidak adanya akta perkawinan karena perkawinannya tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah Hakim harus lebih tegas dalam penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan agar tercapai efektifitas dalam penerapan hukum dan Hakim juga dalam memeriksa gugatan perceraian pada perkawinan yang tidak dicatatkan lebih baik memerintahkan terlebih dahulu untuk melakukan pencatatan perkawinan agar saat sudah diputus cerai tidak mempersulit dalam perolehan akta perceraian.

Kata kunci : Perkawinan, Tidak Dicatatkan, Perceraian.

ABSTRACT

Marriage is one of the important moments in human life. According to Article 1 of the Marriage Law, "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in the One Almighty God". Whereas the requirements for a valid marriage are contained in Article 2 where in paragraph (2) it states that a marriage is valid if it is registered according to statutory regulations. However, in practice there are many marriages that are not registered. This is what causes difficulties in the event of a divorce between the couple. Stabat District Court Decision Number: 26/Pdt.G/2013/PN. Stb is one of the divorce decisions in which the judge decides on a divorce on a marriage that is not registered.

The writing of this law is intended to find out how the judge's considerations are in deciding divorce cases in Decision Number: 26/Pdt.G/2013/PN. Stb whose marriages are not registered at the Civil Registry Office and know the legal consequences of the granting of a divorce suit on marriages that are not registered according to statutory regulations and the results of interviews with judges.

The writing of this law uses a normative juridical method with descriptive research specifications to explain how divorce is carried out through the court in marriage that are not registered.

The results of this research are that divorce in unregistered marriages can be granted in accordance with the Stabat District Court Decision Number: 26/Pdt.G/2013/PN. Stb, where in this decision the judge used the principle of Ius Curia Novit in trying cases, and follow the view of Legism which interpreted Article 2 of the Marriage Law and placed more emphasis on the reasons for divorce. In addition, the result of the granting of a divorce lawsuit in an unregistered marriage is that the parties to the divorce cannot register their divorce and cannot obtain a divorce certificate due to the absence of a marriage certificate because their marriage is not registered at the Civil Registry Office. The advice that can be given by the author is that judge must be more assertive in applying Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law in order to achieve effectiveness in applying the law and judge also in examining divorce claims on unregistered marriage, it is better to order in advance to register marriage so that when the divorce is finalized it does not make it difficult to obtain a divorce certificate.

Keywords : *Marriage, Not Registered, Divorce.*